

* Foreign Trade Policy *

MONITORING

BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN



Russia Extends Gasoline Export Permit For Large Companies²

Pemerintah Rusia melarang ekspor BBM dari Rusia berlaku mulai 1 Maret 2024 hingga 28 Februari 2025 dan **memperpanjang larangan ekspor BBM mulai 1 Maret 2025 hingga 31 Agustus 2025**. Kebijakan larangan tersebut diberlakukan untuk pasokan produsen yang memproses lebih dari satu juta ton minyak pada tahun 2022.

Indonesia menjadi salah satu negara tujuan ekspor produk BBM Rusia sebesar 40.129 barel per hari dan menjadi negara tujuan ekspor ke-14. Merujuk data Sister Kemendag, Indonesia melakukan impor sebesar 210 juta USD pada tahun 2024 dan perpanjangan larangan BBM berpotensi memberikan dampak signifikan bagi pasar global maupun negara yang bergantung pada impor Rusia.

LEGAL ANALYSIS

Pelarangan ekspor berpotensi melanggar Pasal XI GATT 1994.

ADVOCACY

- Meskipun tidak bergantung pada ekspor BBM dari Rusia, Indonesia perlu mengantisipasi tren global terkait pelarangan ekspor dan potensi terganggunya pasokan global atas produk BBM.
- Pelarangan ekspor menjadi salah satu kebijakan perdagangan yang tengah banyak dipilih negara anggota WTO seperti larangan ekspor produk raw material.
- Pelarangan ekspor dari Rusia berpotensi mengganggu supply bahan baku BBM secara global.

² <https://www.reuters.com/business/energy/russia-extends-gasoline-export-permit-large-companies-until-end-feb-2025-01-31/>



Nickel Miners See Ore Export Ban Hurting PHL Standing as Supplier²

Produsen nikel Filipina menolak rencana pemerintah untuk melarang ekspor bijih mineral, termasuk nikel, guna mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dalam negeri. Asosiasi Industri Nikel Filipina (PNIA) menilai kebijakan ini akan menghambat investasi eksplorasi dan merusak posisi Filipina dalam rantai pasokan global.

Filipina tengah menggodok RUU yang melarang ekspor mineral mentah, termasuk nikel yang ditargetkan berlaku mulai bulan Juni 2025. Indonesia telah lebih dahulu memberlakukan larangan ekspor bijih nikel, kebijakan serupa dari Filipina dapat membawa beberapa dampak. Pengurangan pasokan global akibat kebijakan Filipina dapat mempengaruhi harga nikel di pasar internasional yang berpotensi menguntungkan Indonesia sebagai eksportir produk nikel olahan.

ADVOCACY

- Pemerintah Indonesia perlu mencermati dan memantau perkembangan terkait RUU tersebut, khususnya tujuan dan metode pemberlakuan larangan ekspor terhadap bijih mineral termasuk nikel.
- Perlu dipastikan juga apakah kebijakan Filipina dilakukan sementara atau permanen dan diberlakukan ke semua negara termasuk Indonesia.

¹ <https://www.whitecase.com/insight-alert/president-trump-expands-steel-and-aluminum-tariffs-all-countries-effective-march-12>

President Trump Expands Steel and Aluminum Tariffs to All Countries

Kembali, Presiden AS, Donald Trump mengulang kebijakan perdagangan di tahun 2018 yang menaikkan tarif atas baja dan alumunium. **Rencana menaikkan tarif dari 10% menjadi 25% terhadap impor baja dan alumunium untuk semua negara, kecuali Rusia** yang mulai tanggal 12 Maret 2025.

Kebijakan Perdagangan AS tahun 2018 tersebut disengketakan beberapa negara mitranya melalui US - Steel and Alumunium (China, Norway, Switzerland, Turkey) (DS544, DS552, DS556, DS564), Indonesia menjadi pihak ketiga dalam kasus sengketa tersebut. Panelis sengketa menemukan bahwa tarif yang dikenakan AS melampaui batas tarif yang disepakati dalam Jadwal Konsesi WTO-nya, selain itu panelis menolak justifikasi kebijakan perdagangan AS yang berdasarkan pada Keamanan Nasional (Pasal XXI GATT).

Indonesia merupakan eksportir baja dan alumunium ke AS, meskipun volume ekspor masih relatif kecil dibandingkan negara lain seperti China, Kanada, atau Meksiko. Tarif tinggi membuat produk baja dan alumunium Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan produsen dalam negeri AS atau negara yang mendapat pengecualian. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk pendekatan secara bilateral untuk mendapatkan pengecualian serta diversifikasi pasar ekspor ke negara lain yang membutuhkan baja dan alumunium.

LEGAL ANALYSIS

Kebijakan yang dikeluarkan Trump berupa peningkatan tarif secara unilateral berpotensi melanggar:

- Pasal I dan II GATT terkait prinsip Most Favoured Nation dan Schedules of Concession
- Pasal XXVIII GATT terkait Modification of Concession yang mewajibkan kesepakatan oleh seluruh anggota WTO
- Chapaeu Marrakesh Agreement WTO "Determined to preserve the basic principles and to further the objectives underling this multilateral trading system"

³ <https://www.whitecase.com/insight-alert/president-trump-expands-steel-and-aluminum-tariffs-all-countries-effective-march-12>